

Studi Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Riau

AHMAD RIFAI, SYAIFUL HADI, dan NURUL QOMAR

Fakultas Pertanian Universitas Riau

ABSTRACT

The study aimed to analyze development of smallholder oil palm plantations in Riau, focusing on patterns of partnership between farmer and estate companies, financial institutions, marketing agents, and industries, and analyzed profit margin and farmer income contribution to household income. Data had been collected by household survey and indepth interviews, and analyzed using a descriptive-comparative method. The study identified that smallholder oil palm plantations were developed by finance scheme of Nucleus Estate Smallholder (NES), KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), and pure self finance. According to the poverty criteria by Sayogyo, most of the oil palm farmers are not in poor category. The productivity of pure self finance smallholder plantation is 15.5% to 44.0% from the research-based palm oil standard productivity, while smallholder plantations by NES and KKPA have 61.3% to 83.8% and 39.7% to 70.6% of the standard, respectively. It is due to differences in seed used and agricultural technology applied. Marketing of Fresh Fruit Bunches in smallholder plantations by NES and KKPA integrated with nucleus estate or company, while marketing by pure self finance smallholder plantations used intermediate sellers.

Keywords: Riau, smallholder oil palm plantation.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat sejak tahun 1980-an telah memacu pengembangan ekonomi wilayah, merubah peta pengusaha perkebunan kelapa sawit, dan merubah sikap Perusahaan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) sehingga lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hingga akhir 2006, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai 1,53 juta ha dan sekitar sebanyak 55,99% merupakan perkebunan rakyat. Dengan demikian, luas perkebunan kelapa sawit Riau mencapai 25,3% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia dan 17,2% luas daratan Provinsi Riau.

Perkembangan luas areal kelapa sawit menurut status pengusaha di Provinsi Riau pada periode 1996 – 2003 cukup pesat. Perkebunan kelapa sawit rakyat meliputi kebun plasma yang dikembangkan melalui pola PIR-Sus, PIR-Trans, dan KKPA, serta kebun

swadaya murni dan yang didanai melalui bantuan pemerintah secara parsial, misal program PEK (Program Ekonomi Kerakyatan). Pada tahun 2004, luas areal kebun kelapa sawit rakyat seluas 730,030 ha, yang meliputi kebun plasma yang dikembangkan melalui pola PIR-Sus seluas 26.000 ha (3,47%), NES-II ADB seluas 16.000 ha (2,14%), PIR-Trans seluas 87.820 ha (11,73%), KKPA seluas 168.877 ha (22,55%), dan swadaya murni seluas 445.906 ha (59,54%) dan kebun yang didanai bantuan pemerintah secara parsial, seperti program PEK seluas 4.277 ha (0,57%) (Disbun Prov. Riau, 2004; 2005 ; 2006).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang pesat di Provinsi Riau merupakan implikasi kebijakan pembangunan perkebunan nasional, seperti digalakkannya pengembangan perkebunan besar swasta pada era tahun 1980-an, pergeseran pola kebijakan investasi sektor perkebunan kelapa sawit dari pola investasi langsung pemerintah melalui Perseroan Terbatas

* Korespondensi: Fakultas Pertanian Universitas Riau, Jl. Bina Widya No.30 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. Telp. (0761)63270/63271.

Perkebunan (PTP) pada periode 1968-1988, dan dilanjutkan dengan pola investasi gabungan antara pemerintah dan swasta melalui pola PIR-Trans pada periode 1988-1994, serta pengembangan perkebunan swadaya melalui investasi Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) setelah tahun 1994 (Larson, 1996). Walaupun pembiayaan KKPA dengan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dihentikan tahun 2000, pola ini masih terus dikembangkan melalui kemitraan dengan perusahaan besar negara dan swasta. Pada tahun 2003, tercatat lebih dari 54 KUD di Riau yang mengelola kebun kelapa sawit pola KKPA yang bermitra dengan 23 perusahaan, melalui pendanaan dari bank dengan tingkat suku bunga komersial, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 29 perusahaan. Selain faktor kebijakan pemerintah, beberapa alasan yang mendorong perkembangan kebun kelapa sawit di Riau. *Pertama*, secara lingkungan fisik, dengan hamparan lahan yang luas dan kompak serta topografi yang relatif datar maka biaya penyiapan lahan untuk kebun relatif kecil, sehingga menarik investor untuk mengembangkannya. *Kedua*, secara kimia tanah, sebagian besar tanah di Riau mempunyai keasaman yang tinggi sehingga tidak menguntungkan bagi budidaya tanaman pangan. *Ketiga*, peluang ekspor minyak sawit yang masih besar. *Keempat*, pendapatan petani kelapa sawit jauh lebih tinggi dibanding petani lainnya, misal pada tahun 1990 pendapatan bersih petani PIR-Sus kelapa sawit mencapai dua kali lipat dari pendapatan bersih petani PIR-Sus karet. Krisis moneter tahun 1997 dimana harga Tandem Buah Segar (TBS) kelapa sawit telah mendorong petani mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Mulai tahun 1998, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau didominasi oleh perkebunan rakyat secara swadaya, baik dengan melakukan pembukaan lahan baru maupun mengkonversi lahan karet maupun lahan pangan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat, antara lain: 1) belum diterapkannya secara menyeluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan perkebunan kelapa sawit rakyat, sehingga pemerintah tidak

mempunyai kemampuan untuk mengawasi dalam perubahan penggunaan lahan dan hutan yang bernilai konservasi tinggi menjadi areal perkebunan kelapa sawit, serta penyebaran penggunaan bibit tidak unggul (palsu), dan 2) petani tidak mempunyai posisi tawar yang kuat dalam kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti: perusahaan inti (perkebunan besar), investor (lembaga pembiayaan), pembeli hasil (lembaga pemasaran), dan pabrik pengolahan kelapa sawit (PMKS). Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji kebijakan dan sistem perizinan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat,
2. Mengidentifikasi pola kerjasama pekebun kelapa sawit rakyat dengan investor (pembiayaan), perusahaan perkebunan besar, pembeli hasil, dan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit,
3. Menganalisis tingkat keuntungan dan kontribusi pendapatan kebun kelapa sawit rakyat terhadap total pendapatan rumah tangga petani.

BAHAN DAN METODE

Perkebunan kelapa sawit rakyat (*smallholders*) dalam penelitian ini adalah perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar pekerjanya dalam anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber utama mata pencaharian, yang mempunyai jumlah pohon yang dipelihara lebih dari batas minimum usaha (BMU), dan luas areal dibawah 25 hektar. Sebanyak 100 petani menjadi sampel pada penelitian ini yang meliputi pekebun kelapa sawit yang diusahakan rakyat, baik dalam bentuk pola swadaya murni dan berbantuan, KKPA, dan PIR-Sus, maupun PIR-Trans. Sebaran petani yang menjadi sampel penelitian terdapat di:

1. Petani plasma PIR-Sus PTPN V Sei Tapung di Desa Dayo, Kec. Tandun, Kab. Rokan Hulu,
2. Petani plasma PIR-Trans PT. Perdana Inti Sawit di Desa Kepenuhan Baru, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, dan PIR-Trans PT. Brata Sena Plantation di Desa Surya Indah, Kec. Pangkalan Kurus, Kab. Pelalawan,
3. Petani plasma KKPA PT. Musim Mas di

- Desa Betung dan Batang Kulim (Koperasi Sawit Merbau Sakti), Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, dan KKPA PTPN V Sei Tapung di Desa Tandun (KUD Tandun Sibuyayo), Kec. Tandun, serta di Desa Kabun (KUD Bumi Asih), Kec. Kabun, Kab. Rokan Hulu,
4. Petani Swadaya Murni di Desa Pagaran Tapah, Kembang Damai, dan Ngaso di Kec. Kunto Darussalam, dan Desa Pendalian, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, dan
 5. Petani Swadaya Murni di Desa Betung dan Batang Kulim di Kec. Pangkalan Kuras, dan Desa Lubuk Kembang Bunga dan Air Hitam di Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive dengan pertimbangan Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan merupakan daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit tertua dan terluas di Provinsi Riau dan memiliki ragam pola perkebunan kelapa sawit rakyat. Data yang dikumpulkan adalah data sosial ekonomi petani kelapa sawit, sumber permodalan, pola usahatani dan produksi, praktek budidaya dan konservasi, dan informasi kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat. Data dan informasi diperoleh melalui metode survei, dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dilengkapi dengan lembar kuesioner, dengan sampel berlapis per golongan petani, termasuk penentu kebijakan di provinsi dan kabupaten.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk menghitung tingkat keuntungan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, analisis pendapatan, analisis pemasaran dan sistem tataniaga produksi perkebunan kelapa sawit rakyat. Analisis pemasaran TBS dilakukan dengan mengidentifikasi saluran pemasaran TBS yang dilakukan petani smallholder (*existing marketing channel*), menganalisis margin dan efisiensi pemasaran. Efisien pemasaran dihitung dengan rumus Soekartawi, 1993.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

Hampir semua petani swadaya murni tidak mengetahui prosedur perijinan membuka

kebun kelapa sawit. Petani swadaya murni juga tidak pernah melakukan pendaftaran kebun kepada Dinas Perkebunan, baik berkaitan dengan luas maupun komoditas yang diusahakan. Pemahaman tentang perijinan masih sebatas pengurusan surat-surat tanah sebagai bukti legalitas kepemilikan lahan, dari tingkat desa hingga kabupaten. Ditemukan hanya sedikit petani yang mempunyai surat-surat kepemilikan tanah dari Camat dan tidak ditemukan adanya petani yang mempunyai Sertifikat BPN kecuali petani plasma di PIR-Sus, PIR-Trans, dan KKPA.

2. Pola Pembiayaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat

2.1. Pembiayaan Pola PIR

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 353/Kpts/Kb.510/6/2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Mentan Nomor 333/ Kpts/Kb.510/6/1986, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Pola Pir-Trans, dijelaskan bahwa pembiayaan pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti yang diambil alih oleh Bank Indonesia (BI) pada waktu penyerahan pemilikan kebun plasma kepada petani peserta menurut tata cara yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan kebun inti dan fasilitas pengolahannya menjadi beban perusahaan inti. Biaya pembangunan kebun plasma yang diambil alih oleh Bank Pemerintah dan Bank-bank lainnya yang disetujui oleh BI terdiri dari biaya pembangunan kebun plasma (mulai persiapan sampai penyerahan kebun plasma termasuk bunganya). Jumlah biaya pembangunan kebun plasma dihitung berdasarkan unit cost ditambah *overhead cost* dan jasa manajemen sebesar 15%.

2.2. Pembiayaan Pola KKPA

Pembiayaan pengembangan perkebunan KKPA bersumber dari perbankan, dengan perusahaan inti sebagai penjamin (*avalis*). Setelah fasilitas kredit lunak dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk perkebunan KKPA dihapus, maka petani menggunakan kredit bank dengan tingkat suku bunga komersial. Berbeda dengan pola PIR, pembangunan

perkebunan rakyat pola KKPA beban kredit yang menjadi tanggungan petani hanya biaya pembangunan kebun kelapa sawit yang disesuaikan dengan kebutuhan seluruh biaya pembangunan kebun dan tingkat bunga yang berlaku.

Pangajuan kredit dilakukan oleh koperasi sebagai wakil petani, yang diikuti dengan MoU dan beberapa persyaratan yang mengikat antara koperasi, perusahaan inti, dan bank pelaksana (pemberi kredit). Perusahaan inti menyerahkan surat pernyataan notariil yang berisi: 1) menjamin segala kewajiban kredit plasma, 2) kesediaan perusahaan inti untuk membeli dan memotong hasil panen petani, 3) kesediaan perusahaan inti untuk membentuk tabungan terbeku sebesar 10% dari jumlah kredit yang dicairkan, 4) kesediaan perusahaan inti untuk membayar selisih suku bunga yang ditetapkan dengan suku bunga yang dibebankan kepada petani plasma (kasus di PT. Musim Mas dengan Koperasi sawit Merbau Sakti), termasuk bunga yang timbul akibat pembentukan kredit bunga masa tanam (IDC), dan 5) kesediaan perusahaan inti menyerahkan *Corporate Guarantee* secara notariil. Koperasi sebagai wadah petani harus menyerahkan surat pernyataan notariil yang memuat kesanggupan untuk: 1) dilakukan pemotongan minimal sebesar angsuran (pokok dan atau bunga) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ditambah 10% dari hasil penjualan untuk tabungan petani, 2) dibebani suku bunga komersial sejak kredit direalisasikan hingga kredit lunas, 3) menyerahkan pengelolaan keuangan khusus untuk KKPA kepada perusahaan inti, dan 4) menyerahkan perjanjian kerjasama antara koperasi dan perusahaan inti.

2.3. Pembiayaan Pola Swadaya Murni

Petani plasma PIR yang telah melunasi cicilan kredit, pada umumnya melakukan ekspansi membangun kebun baru dengan cara meminjam modal usaha dari bank, dengan sertifikat kebun yang dimiliki sebagai agunan. Berbeda dengan petani swadaya tempatan, yang biasanya membuka lahan dalam skala kecil, membangun kebun dengan modal sendiri secara bertahap tanpa menggunakan fasilitas kredit bank ataupun dari sumber-sumber pembiayaan

informal. Keterlibatan perusahaan perkebunan besar juga tidak ada, baik dalam pembiayaan, bantuan teknis, maupun pemasaran.

Berdasarkan hasil survey lapangan, pada umumnya petani kelapa sawit swadaya murni oleh masyarakat tempatan melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit tanpa menggunakan sumber pembiayaan formal. Tercatat, sebanyak 90,3% petani membangun kebun secara bertahap dengan modal sendiri. Sebagian kecil petani lainnya menggunakan kredit informal dari keluarga (famili) dan pedagang perantara (*toke*), dan biasanya hanya untuk kebutuhan pemeliharaan tanaman.

3. Produktivitas Tanaman

Produktivitas tanaman kelapa sawit milik plasma pada pola KKPA dan PIR lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tanaman kelapa sawit swadaya murni. Hal ini disebabkan oleh penerapan teknologi perkebunan kelapa sawit pola PIR dan KKPA relatif lebih baik dibandingkan dengan perkebunan kelapa sawit swadaya. Selain karena pembiayaan pembangunan kebun pada pola PIR dan KKPA sudah didukung oleh pinjaman (kredit) pengembangan perkebunan dari bank, pembinaan petani plasma, juga dilakukan secara berkelanjutan oleh perusahaan inti sampai dilakukan konversi (pengalihan pengelolaan) dari perusahaan inti kepada petani. Proses pembinaan ini merupakan proses alih teknologi antara perusahaan perkebunan sebagai inti dengan petani plasma, sehingga dalam jangka panjang pengelolaan kebun plasma menjadi lebih baik.

Produktivitas tanaman kelapa sawit pada perkebunan kelapa sawit pola swadaya murni hanya mencapai 15,60% sampai dengan 44,00% dibandingkan dengan potensi produktivitas standar menurut Lubis (2000) pada lahan kelas 3, sedangkan produktivitas perkebunan kelapa sawit pola KKPA mencapai 39,68% sampai dengan 70,60%, dan produktivitas perkebunan kelapa sawit pola PIR-Trans mencapai 61,3% sampai dengan 83,8%.

Permasalahan pokok yang dihadapi petani swadaya murni dalam meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit adalah

keterbatasan pembiayaan untuk membeli bibit unggul, dan pemeliharaan tanaman selain tidak adanya bimbingan dan pembinaan. Penerapan teknologi pada petani swadaya diperoleh dari petani plasma yang ada di sekitarnya.

4. Pemasaran dan Pengolahan TBS

Pengembangan perkebunan pola PIR telah mengupayakan integrasi antara kebun dan pabrik pengolahan yang disediakan oleh perusahaan inti, sehingga kerjasama pemasaran dan pengolahan TBS telah terjalin antara perusahaan inti dan perkebunan rakyat (plasma). Hal ini juga terjadi pada pola KKPA yang bermitra dengan perusahaan besar.

Berbeda halnya pada pengembangan perkebunan kelapa sawit swadaya murni, dimana tidak tersedia PMKS yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, TBS dari perkebunan rakyat swadaya murni dan perkebunan swasta kecil akan diolah di PMKS lain milik perusahaan perkebunan besar atau PMKS tanpa kebun. Namun, penjualan TBS ke pabrik tidak dapat langsung dilakukan oleh petani swadaya murni, karena produksi TBS yang relatif sedikit dan tidak memiliki transportasi sendiri, dan untuk memasukkan TBS ke PMKS memerlukan DO (*Delivery Order*) atau Surat Pengantar Buah (SPB) yang dikeluarkan oleh PMKS. Dalam kondisi demikian, pemasaran TBS petani swadaya murni melibatkan lembaga pemasaran sebagai perantara antara PMKS dan petani kelapa sawit.

Analisis efisiensi pemasaran TBS di lokasi penelitian ditemukan bahwa pemasaran TBS milik petani plasma pola PIR lebih efisien (efisiensi pemasaran 0,06) dibandingkan dengan pemasaran TBS pola KKPA (efisiensi pemasaran 0,09) dan swadaya murni (efisiensi pemasaran 0,10). Efisiensi pemasaran pada dasarnya ditentukan oleh komponen biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pemasaran dan nilai produksi yang ditransaksikan. Permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah tingginya ongkos bongkar di PMKS yang ditentukan oleh serikat buruh pabrik, dan tingginya biaya transportasi dipengaruhi oleh jarak kebun dengan PMKS tempat penjualan. Biaya pemasaran pada pola swadaya murni lebih tinggi

yaitu Rp. 94/kg, pola PIR dengan penjualan ke perusahaan inti Rp. 43,5/kg, pola PIR dengan penjualan ke luar inti Rp. 73/kg, dan pola KKPA Rp. 50/kg.

5. Pendapatan Petani

Rata-rata pendapatan rumah tangga petani swadaya murni sebesar Rp. 2.020.500 per bulan atau setara dengan 1.073,4 kg beras per kapita per tahun. Pengeluaran rumah tangga terendah sebesar 292 kg beras per kapita per tahun dan tertinggi 4.781 kg beras per kapita per tahun. Pensetaraan dalam satuan konsumsi beras disesuaikan dengan harga beras eceran kelas "medium" di lokasi penelitian, sebesar Rp. 4.500/kg (catatan : US \$ 1 = Rp. 8.800).

Menurut kriteria Sayogyo, sebagian besar petani kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau dikategorikan "berkecukupan". Dari kelompok petani swadaya murni diperkirakan hanya 3% petani termasuk "miskin" (mempunyai tingkat pengeluaran setara dengan kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun), 21% petani termasuk "hampir miskin" (mempunyai tingkat pengeluaran setara dengan 320 - 640 kg beras per kapita per tahun), 47% penduduk "berkecukupan" (mempunyai tingkat pengeluaran setara dengan 640 - 960 kg beras per kapita per tahun), dan 29% petani "benar-benar di atas garis kemiskinan" (mempunyai tingkat pengeluaran setara di atas 960 kg beras per kapita per tahun). Petani yang masuk dalam kategori "miskin" dan "hampir miskin" biasanya hanya mempunyai kebun kelapa sawit 1 hektar atau kurang, atau tanamannya masih relatif muda (< 8 tahun).

Hasil penelitian juga ditemukan bahwa kebun kelapa sawit bagi petani swadaya murni ternyata belum merupakan sumber pendapatan utama pendapatan rumah tangga. Kontribusi pendapatan kebun kelapa sawit terhadap total pendapatan rumah tangga masih menempati urutan kedua, sebesar 36,6%, di bawah kebun karet yang mencapai 40,2%. Hal ini disebabkan sebagian besar umur tanaman kelapa sawit yang diusahakan masih relatif muda, sedangkan kebun karet yang telah diusahakan secara turun temurun.

Rata-rata pendapatan kotor petani plasma kelapa sawit pola KKPA dengan luas

kebun 2 hektar dan umur tanaman 5-6 tahun berkisar Rp. 276.848 - Rp. 1.236.281 per KK per bulan. Setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan, panen dan pengangkutan, cicilan hutang, dan biaya dan pemotongan lainnya, meliputi jasa koperasi, kas kelompok tani, dan iuran peremajaan, maka pendapatan bersih petani berkisar Rp. 42.473 – Rp. 257.596 per KK per bulan.

Pendapatan bersih rata-rata petani plasma pada pola PIR dengan luas kebun 2 hektar dan umur tanaman 16 tahun adalah Rp. 1.574.161/KK/bulan dan pada umur 24 tahun menurun menjadi Rp. 1.265.490/KK/bulan, dimana cicilan kredit kebun telah lunas, sehingga pemotongan biaya hanya dilakukan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, pupuk dan pemupukan, panen dan pengangkutan, dan biaya pemotongan lainnya, meliputi jasa koperasi, kas kelompok tani, dan IDAPERTABUN. Berdasarkan data pendapatan petani kebun kelapa sawit yang telah melunasi kredit kebun di PTPN V Sei Tapung dan PT. Surya Bratasena Plantation, maka program PIR di Provinsi Riau dinilai telah berhasil melampaui target pendapatan petani yang diharapkan pada tahap awal program ini diluncurkan, yakni sebesar US\$ 1.500/KK/Tahun. Sementara itu, bagi petani yang masih belum melunasi cicilan kredit, pada umur tanaman 9 tahun, pendapatan bersih petani hanya Rp. 811,089/KK/bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat selama ini di Provinsi Riau telah memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun, pembinaan dan kemitraan yang lemah pada petani kelapa sawit swadaya murni telah mengakibatkan beberapa hal yang merugikan pengembangan pola ini, yaitu: 1) lemahnya perhatian pada aspek legalitas kepemilikan lahan usaha perkebunan; 2) rendahnya produktivitas karena terbatasnya modal untuk penyediaan bibit unggul dan pemeliharaan tanaman; 3) masih rendahnya harga TBS yang diterima petani akibat saluran pemasaran yang terlalu panjang.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka disarankan agar perkebunan

kelapa sawit rakyat yang mendominasi usaha perkebunan kelapa sawit di Riau ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan perusahaan besar. Selayaknya, pemilik PMKS secara proaktif menjalin kemitraan pembelian TBS dengan petani dalam penyediaan TBS bahan baku PMKS. Untuk mengimplementasikan kemitraan ini, petani kelapa sawit pola swadaya murni harus membentuk kelembagaan berupa kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani agar memiliki kekuatan posisi tawar (*bargaining position*) dengan pabrik. Fasilitasi terhadap pembentukan kelembagaan ini harus mendapat dukungan dari pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. 1998. Perkebunan, dari Nes ke PIR. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Dinas Perkebunan Provinsi Riau. 2003. Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2003. Pekanbaru
- _____. 2004. Data Statistik Luas Areal dan Produksi Perkebunan Per Komoditi Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2003. Pekanbaru
- _____. 2005. Renstra tahun 2005 – 2010. Pekanbaru
- _____. 2006. Data Statistik Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2004. Pekanbaru
- Fauzi, Y., Widyastuti, Y.E., Styawibawa I., Hartono, R. 2005. Kelapa sawit; Budidaya, Pemanfaatan
- Hasil dan Limbah, Analisis Usaha dan Pemasaran. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hadi, S. 2004. Comparative Analysis of the Competitiveness of the Indonesian and Malaysian Palm Oil Industry. Ph.D Thesis. University Putra Malaysia. Malaysia.
- Larson, D.F. 1996. Indonesia's Palm Oil Sub-Sector. Policy Research Working Paper No. 1654. Washington: The World Bank.
- Soekartawi, 1993, Analisis Usahatani, UI Press, Jakarta.